



Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 34 Tahun 2025
Tentang

PERUBAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

<https://bappeda.bengkaliskab.go.id>
Pemerintah Kabupaten Bengkalis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (RKPD-P) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah perubahan terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi aktual pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan dan menjamin konsistensi serta efektifitas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian sasaran dan target RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Dengan adanya dokumen ini, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat lebih baik dan efektif dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis yang pada akhirnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN	8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI TRIWULAN KE I	10
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	17
3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.	17
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025.....	17
3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bengkalis.....	19
3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025.....	28
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	30
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	32
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	34
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	35
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	37
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	37
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025.....	43
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	47
4.1.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	58
4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	59
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	96
BAB VI PENUTUP	97
6.1 KAIDAH PELAKSANAAN	97
6.2 PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.....	97

Daftar Tabel

TABEL II-1 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I.....	10
TABEL III-1 PROYEKSI PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS 2025	30
TABEL III-2 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025	32
TABEL III-3 PROYEKSI BELANJA DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 ...	34
TABEL III-4 PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 (Rp. JUTAAN).....	36
TABEL IV-1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025	44
TABEL IV-2 INDIKATOR MAKRO RKP DENGAN RKPD PROVINSI RIAU TAHUN 2025	46
TABEL IV-3 HUBUNGAN MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 – 2026 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	47
TABEL IV-4 SASARAN INDIKATOR PEMBANGUNAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS 2025 DENGAN SASARAN RKP 2025.....	57
TABEL IV-5 KONSISTENSI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DENGAN RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025.....	58
TABEL IV-6 SINKRONINASI TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025	60
TABEL IV-7 PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025.....	66
TABEL IV-8 SINERGI KEBIJAKAN PROVINSI RIAU DENGAN KABUPATEN BENGKALIS.....	72
TABEL IV-9 SINKRONISASI SPM DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025	92

Daftar Gambar

GAMBAR I-1 BAGAN ALIR HUBUNGAN ANTARA PENYUSUNAN RKPD DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	7
GAMBAR III-1 PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BENGKALIS TERMASUK MINYAK BUMI DAN GAS DENGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	20
GAMBAR III-2 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020-2024.....	22
GAMBAR III-3 PERBANDINGAN INFLASI KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024.....	23
GAMBAR III-4 PERBANDINGAN TINGKAT PENGANGGURAN TEBUKA KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PROVINSI RIAU	24
GAMBAR III-5 GINI RATIO KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 – 2023	25
GAMBAR III-6 PERBANDINGAN IPM KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PROVINSI RIAU.....	27
GAMBAR III-7 PERBANDINGAN KEMISKINAN ANTARA KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PROVINSI RIAU.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Proses pembangunan yang efektif dan efisien memerlukan perencanaan yang matang, salah satunya melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini harus dapat menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Namun demikian pembangunan yang terjadi seringkali dihadapkan pada berbagai dinamika dan perubahan yang tidak terduga. Baik faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi nasional dan bencana alam, maupun faktor internal seperti evaluasi terhadap pelaksanaan program dan perubahan prioritas daerah, dapat menyebabkan kebutuhan akan penyesuaian dalam perencanaan. Dalam hal ini, Perubahan RKPD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.

Perubahan RKPD dilakukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek, baik itu dari sisi anggaran, kebijakan, maupun prioritas pembangunan daerah. Demikian pula, hasil evaluasi terhadap implementasi RKPD yang sebelumnya dapat mengungkapkan adanya program yang tidak berjalan dengan optimal, yang perlu diperbaiki atau digeser sesuai dengan kebutuhan yang lebih mendesak.

Melalui Perubahan RKPD, pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan tersebut dan memastikan bahwa seluruh kebijakan serta alokasi anggaran yang ada dapat diarahkan pada tujuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan juga merupakan upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan pembangunan.

Pasal 343 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur prosedur perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan RKPD diperlukan ketika terdapat ketidaksesuaian antara rencana pembangunan yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual yang terjadi selama tahun berjalan. Secara lebih rinci, pasal ini mengidentifikasi dua kondisi utama yang memerlukan perubahan RKPD, yaitu:

- a) Perkembangan yang Tidak Sesuai dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah, dan Keuangan Daerah

Salah satu alasan utama di balik perubahan RKPD adalah ketidaksesuaian antara perencanaan yang sudah ditetapkan dengan kondisi riil yang terjadi dalam prioritas pembangunan daerah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal ini adalah:

1. Perubahan Prioritas Pembangunan

Ketika kondisi atau situasi di daerah mengalami perubahan yang signifikan—misalnya, bencana alam, krisis ekonomi, atau perubahan demografis—prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan mungkin perlu diubah agar lebih relevan dengan kebutuhan mendesak. Misalnya, fokus anggaran yang semula dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bisa dialihkan untuk pemulihan pasca-bencana atau penanggulangan pandemi.

2. Fluktuasi Ekonomi Daerah

Jika ekonomi daerah mengalami penurunan atau gejolak, hal ini bisa memengaruhi kapasitas fiskal daerah, yang pada gilirannya berpengaruh pada pelaksanaan program-program pembangunan. Oleh karena itu, RKPD perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan yang ada masih dapat dicapai meskipun dengan keterbatasan anggaran.

3. Perubahan dalam Kerangka Keuangan Daerah

Pemerintah daerah kemungkinan dihadapkan pada perubahan dalam sumber pendapatan atau alokasi dana dari pemerintah pusat. Jika terjadi penurunan atau perubahan dalam dana transfer, maka RKPD harus disesuaikan agar tidak ada program yang terlantar akibat kekurangan dana. Penyesuaian anggaran yang efektif menjadi langkah penting agar seluruh program prioritas dapat tetap berjalan.

b) Keadaan yang Menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya Harus Digunakan untuk Tahun Berjalan

Selain perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal, pergeseran dalam saldo anggaran lebih (SAL) dari tahun anggaran sebelumnya juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perubahan RKPD. Saldo anggaran lebih adalah sisa anggaran yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berjalan, dengan catatan:

1. Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih

Jika terdapat saldo anggaran lebih yang harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah perlu menyesuaikan alokasi dan perencanaan untuk memastikan bahwa sisa anggaran tersebut digunakan secara optimal. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam prioritas program atau kegiatan yang tadinya tidak dianggarkan, namun kini dapat dimasukkan dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih tersebut.

2. Penyesuaian Pembiayaan

Saldo anggaran lebih ini juga bisa digunakan untuk menambah pembiayaan program-program yang kurang dana, yang membutuhkan alokasi tambahan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, RKPD harus diubah agar saldonya dapat dialokasikan dengan efisien untuk mendukung program yang penting atau mendesak.

Kabupaten Bengkalis pada tahun berjalan telah terjadi perubahan dimana prediksi ekonomi makro dan program kegiatan yang pada awal perencanaan mengalami perubahan yang signifikan dan adanya saldo anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, maka oleh sebab itu perlu disusun perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan ini dinilai sangat penting untuk menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya baik daerah, provinsi dan nasional, perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis disusun dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
2. Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
3. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-OPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap OPD.
4. Perubahan RKPD nantinya dijabarkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD dengan berpedoman juga kepada Renja-PD.

Perubahan RKPD Tahun 2025, memperhatikan dan mengikuti pedoman yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025, RKPD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045, dan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan perubahan kondisi aktual daerah sebagai berikut:

- a) Adanya peningkatan dalam target komponen pendapatan daerah hingga akhir semester dua yang cukup signifikan berbeda dari asumsi atau prediksi awal perencanaan;
- b) Diprolehnya angka pasti SILPA tahun anggaran 2024 hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2024;
- c) Adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- d) Adanya perubahan kerangka ekonomi dan asumsi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perkembangan sampai dengan triwulan I dan II serta proyeksi untuk triwulan III;
- e) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2024 kegiatan baru/kegiatan alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2025; seperti adanya kebijakan nasional tentang Pilkada serentak yang menyebabkan perubahan pada beberapa kegiatan beserta pagu anggaran.

- f) Untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah;

Mengacu pada hal-hal tersebut, perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi suatu langkah yang harus dilakukan dengan menyesuaikan jumlah, jenis, dan perinciannya sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan hingga triwulan II. Program dan kegiatan yang diajukan dalam perubahan RKPD ini adalah respons terhadap berbagai masalah yang masih muncul di masyarakat dan memerlukan penanganan segera, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, seperti upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian target RPJMD 2021-2026 yang telah dijabarkan dalam RKPD Tahun 2025.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025;
- p) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- r) Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 23);
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
- t) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor: 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor: 7);
- u) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 30).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Secara hierarki, penyusunan Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini merupakan penggalan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026. Karena itu, Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026. Hal ini kemudian diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu dalam penyusunan

2025 dengan tetap mengacu pada delapan prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yaitu, Sumber Daya Manusia, Aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, perekonomian daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah antara lain:

- a) Sebagai acuan penyusunan perubahan rencana kerja bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025;
- b) Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang didahului dengan penyusunan perubahan kebijakan umum APBD, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan Tahun 2025;
- c) Sebagai acuan OPDD Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Perubahan Renja OPD Tahun 2025
- d) Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, menunjukkan adanya perubahan kondisi struktur ekonomi daerah dan perubahan pada beberapa anggaran kegiatan pembangunan daerah dari prediksi dan asumsi awal RKPD.
- e) Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Arah Kebijakan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bengkalis

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI TRIWULAN KE I

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025, yang telah mencakup hingga Triwulan I tahun ini.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menjalankan 34 urusan pembangunan daerah, yang meliputi 6 urusan wajib di bidang pelayanan dasar, 19 urusan lainnya, dan 9 urusan pilihan. Pelaksanaan urusan pembangunan ini dilaksanakan oleh 47 Perangkat Daerah, yang terdiri dari dinas, badan, kantor, sekretariat, serta kecamatan..

Hasil evaluasi kinerja target dan realisasi keuangan hingga triwulan ke I di Kabupaten Bengkalis menunjukkan capaian yang maksimal sekitar 14,72 %. Detail mengenai evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025 hingga triwulan ke II dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II-1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		TRIWULAN I	
		K	Rp,
1	Dinas Pendidikan	28,33	13,65
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	21,36	13,95
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	RSUD Bengkalis	20,75	27,16
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4	RSUD Kecamatan Mandau	16,35	11,15
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		TRIWULAN I	
		K	Rp,
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,05	26,91
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	4,22	26,69
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	Dinas Pemadam Kebakaran	23,34	8,64
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
8	Satuan Polisi Pamong Praja	11,01	27,39
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
9	Dinas Sosial	13,22	5,61
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9,20	8,22
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,90	12,47
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
12	Dinas Ketahanan Pangan	6,55	9,35
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
13	Dinas Lingkungan Hidup	17,09	19,93

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		TRIWULAN I	
		K	Rp,
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,75	30,86
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27,75	19,57
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20,99	8,77
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
17	Dinas Perhubungan	19,67	17,81
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	22,10	5,94
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6,74	13,46
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15,35	15,49
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
21	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	11,50	12,19

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		TRIWULAN I	
		K	Rp,
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,92	14,38
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
23	Dinas Perikanan	0,00	10,03
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
24	Dinas Perkebunan	6,65	8,69
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan	25,18	16,04
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9,89	9,09
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
27	Inspektorat	100,00	10,30
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17,05	11,64
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18,49	13,23
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		TRIWULAN I	
		K	Rp,
30	Badan Pendapatan Daerah	30,02	22,83
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
31	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	11,32	10,43
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	17,18	12,66
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	12,68
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23,61	5,79
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
35	Sekretariat DPRD	7,40	6,20
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
36	Sekretariat Daerah (Bag, Perenc dan keuangan)	14,19	5,88
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
37	Kecamatan Bengkalis	12,12	11,80
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
38	Kecamatan Bukit Batu		

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		TRIWULAN I	
		K	Rp,
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
39	Kecamatan Mandau	0,00	12,54
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
40	Kecamatan Bantan	0,35	1,35
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
41	Kecamatan Pinggir	1,97	10,37
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
42	Kecamatan Siak Kecil	16,93	13,82
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
43	Kecamatan Rупat	8,70	7,65
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
44	Kecamatan Rупat Utara	22,08	8,03
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
45	Kecamatan Bandar Laksamana	9,33	4,30
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
46	Kecamatan Bathin Solapan	0,00	7,46
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	
		TRIWULAN I	
		K	Rp,
47	Kecamatan Talang Muandau	5,74	9,26
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah
KABUPATEN BENGKALIS		14,72	12,86
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro terkini, mencocokkan dengan ketersediaan anggaran, serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan pengelolaan anggaran yang lebih baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran pada tahun berjalan hingga triwulan I. Secara keseluruhan, tujuan utama perubahan RKPD adalah untuk meningkatkan responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta kualitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah yang optimal didasarkan pada kerangka ekonomi dan proyeksi perekonomian daerah. Pendekatan *money follow program* diterapkan dalam kebijakan ini untuk memastikan bahwa pengalokasian anggaran daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi proyeksi anggaran dan kondisi keuangan yang ada, kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025.

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah berfungsi sebagai dasar pemikiran atau kerangka kerja dalam menangani permasalahan pembangunan serta untuk mengantisipasi isu-isu strategis di tingkat daerah. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan ekonomi, yang merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran dalam periode tertentu.

3.1.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi nasional pada tahun 2025 berfokus pada upaya untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global, mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kebijakan ini mencakup peningkatan sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur, pertanian, dan digitalisasi, serta pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan juga akan mendukung penguatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Fokus lainnya adalah memperkuat ketahanan ekonomi nasional,

baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sistem keuangan, agar lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 difokuskan pada penguatan dasar-dasar transformasi sebagai langkah awal menuju Visi Indonesia Emas 2045, dengan Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Periode pembangunan 2025–2029 memiliki peranan sangat strategis dalam meletakkan fondasi transformasi yang akan mendukung tingkat pertumbuhan di masa mendatang, sekaligus menjadi peluang emas bagi bangsa untuk meraih cita-cita Indonesia Emas.

Sehubungan dengan itu pada tahun 2025, pemerintah menetapkan tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah sebagai "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penetapan tema ini didasarkan pada fakta bahwa tahun 2025 merupakan awal dari RPJMN 2025–2029, yang juga menjadi bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dalam mewujudkan Indonesia Emas. Tema ini diimplementasikan melalui delapan Prioritas Nasional antara lain adalah:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Memajukan Industri Agro-Maritim di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Menguatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menargetkan pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 2,08 – 2,15 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,63 – 5,78 persen, pengurangan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,7 – 6,8 persen, rasio gini berada pada 0,265 – 0,270, indeks modal manusia sebesar 0,56, dan penurunan intensitas gas rumah kaca sebesar 13 persen.

3.1.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau

Pada tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan Pembangunan ekonomi, dengan mengusung tema Pembangunan daerah dalam RKPD 2024 yaitu: “Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah”.

Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain, 1) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM, yang difokuskan kepada: Pemenuhan Prasarana dasar, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender; 2) Peningkatan Tata Kelola, yang difokuskan kepada : Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital; 3) Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang difokuskan kepada: Pemenuhan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 4) Penguatan Ekonomi yang difokuskan kepada : Pertanian, Hilirisasi SDA, Penguatan Ekonomi masyarakat, Pariwisata Berbudaya Melayu.

3.1.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bengkalis

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi untuk upaya pembangunan ekonomi daerah maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ditetapkan dalam Perubahan RKPD 2025 yang sama dengan RKPD murni tahun 2025 yaitu “Memantapkan kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur, Tatakelola Pemerintahan dan perekonomian masyarakat menuju Bengkalis berrmarwah, maju dan sejahtera.

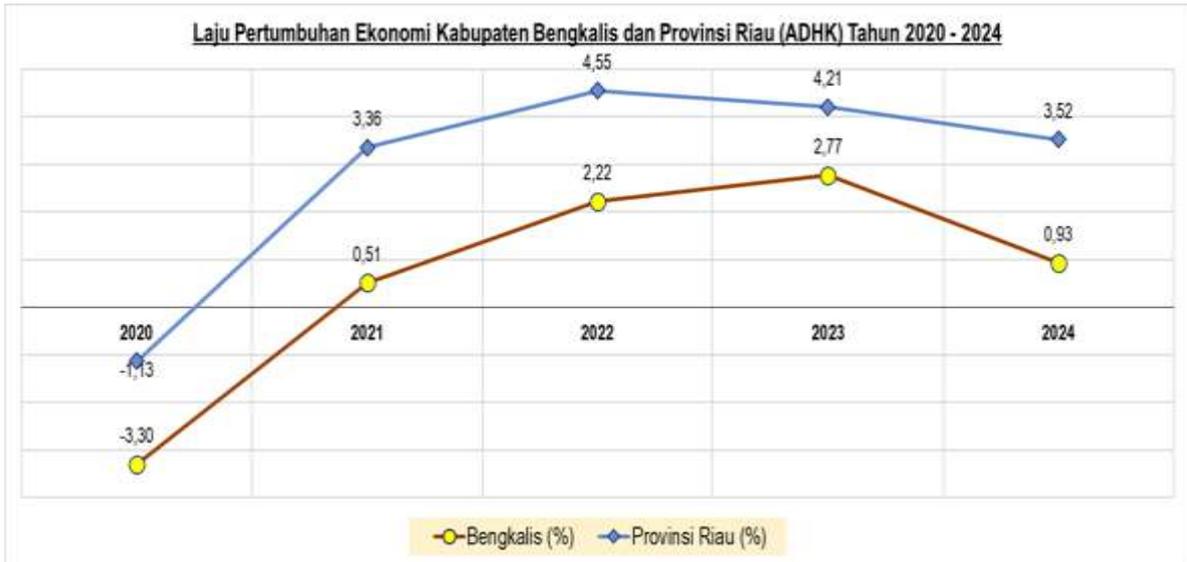
Adapun yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 adalah: 1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 2) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital serta perbaikan kapasitas fiskal daerah; 3) Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah strategis; 4) Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bengkalis

A. Pertumbuhah Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi daerah mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, yang seringkali diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan daya saing, investasi, dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bengkalis, dilihat dari pertumbuhannya sama halnya dengan wilayah lainnya, yakni dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar lokal serta nasional. Berikut adalah data Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Gambar III-1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Termasuk Minyak Bumi Dan Gas dengan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Data pada tabel diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan ekonomi yang cukup signifikan dengan angka pertumbuhan sebesar -3,30%. Penurunan ini adalah sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan besar dalam aktivitas ekonomi. Sektor-sektor seperti perdagangan, pariwisata, dan industri mengalami penurunan permintaan yang tajam akibat pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan untuk menanggulangi penyebaran virus. Selain itu, sektor informal dan UMKM juga terdampak, dengan banyak usaha kecil yang terpaksa tutup atau mengurangi kapasitas operasionalnya. Kondisi ini menyebabkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada tahun tersebut.

Pada tahun 2021 dan 2022, Kabupaten Bengkalis menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 2,22% dan 2,77%. Proses pemulihan ini sebagian besar didorong oleh kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah pusat dan daerah untuk merangsang kegiatan ekonomi, serta mulai beroperasinya sektor-sektor yang sebelumnya tertutup selama pandemi. Adanya pelonggaran pembatasan sosial juga memungkinkan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi, yang meningkatkan konsumsi domestik dan produksi barang dan jasa. Selain itu, sektor perdagangan dan sektor konstruksi turut berperan dalam pemulihan ekonomi daerah, meskipun tantangan global masih ada.

Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis kembali melambat menjadi hanya 0,93%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan dalam beberapa tahun sebelumnya, potensi pertumbuhan ekonomi di daerah ini mulai terhambat oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah penurunan harga komoditas yang mempengaruhi sektor ekonomi utama daerah ini, seperti minyak dan gas. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global, seperti inflasi yang meningkat, gangguan pasokan global, serta perang dagang, turut memberikan tekanan

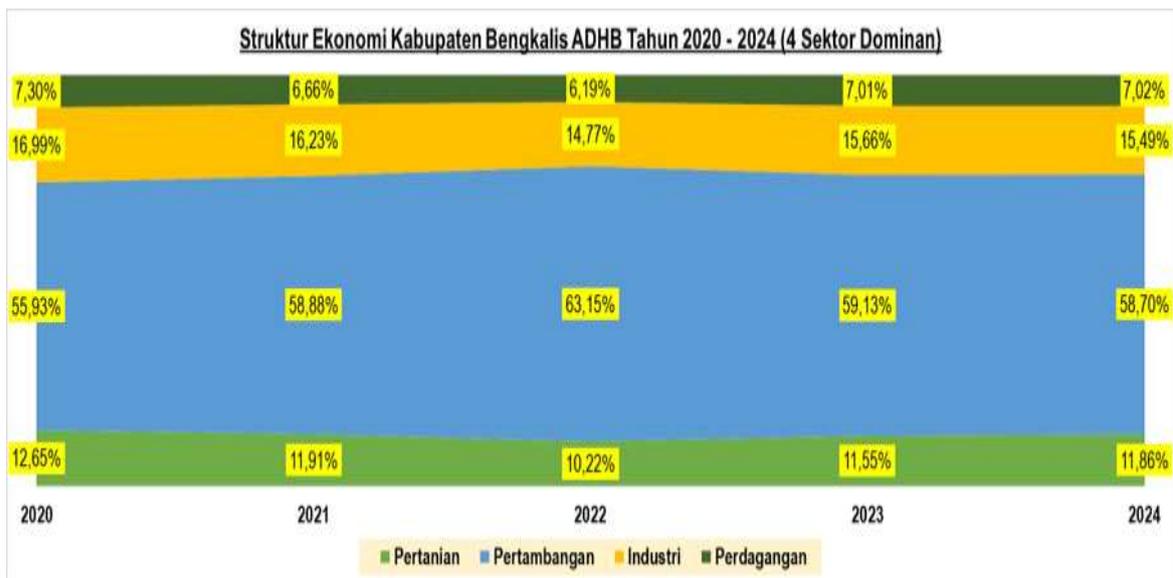
pada ekonomi lokal. Kabupaten Bengkalis perlu beradaptasi dengan menciptakan sektor-sektor ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan berdiversifikasi, seperti sektor pariwisata dan industri hijau, untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dan menjaga pertumbuhan jangka panjang. Jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama kurun waktu 2020-2024 kinerja perekonomian Kabupaten Bengkalis berada dibawah kinerja perekonomian Provinsi Riau umumnya.

a) Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah menggambarkan komposisi berbagai sektor yang berkontribusi terhadap pendapatan dan perkembangan ekonomi. Di Indonesia, struktur perekonomian dapat dibagi menjadi tiga sektor utama, yaitu sektor primer (pertanian, perikanan, dan pertambangan), sektor sekunder (industri manufaktur dan konstruksi), serta sektor tersier (perdagangan, jasa, dan sektor lainnya). Sektor primer umumnya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sementara sektor sekunder bertanggung jawab atas pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Sektor tersier, yang semakin berkembang, mencakup berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan.

Perubahan dalam struktur perekonomian seringkali mencerminkan tingkat kemajuan teknologi dan transformasi sosial. Misalnya, meningkatnya dominasi sektor industri dan jasa seiring dengan berkurangnya ketergantungan pada sektor pertanian menunjukkan adanya proses industrialisasi dan urbanisasi. Hal ini berimplikasi pada pergeseran pola konsumsi dan pekerjaan, di mana semakin banyak penduduk yang bekerja di sektor manufaktur dan jasa dibandingkan di sektor pertanian. Struktur perekonomian yang beragam dan berkembang secara dinamis ini memungkinkan daerah untuk lebih resilien terhadap krisis ekonomi dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar global.

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis dilihat dari kontribusi masing-masing sektor menurut lapangan usaha terlihat pada gambar berikut:



Gambar III-2 Struktur Perekonomian Kabupaten Bengkulu Tahun 2020-2024

Gambar III.2 diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2020-2024 struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan bahwa dominasi sektor pertambangan yang sangat kuat, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 55% setiap tahunnya. Selama kurun waktu tersebut tercatat bahwa tahun 2022 sektor pertambangan memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB yakni sebesar 63,15%. Keadaan ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Bengkulu memiliki ketergantungan yang cukup besar pada sektor pertambangan terutama sektor migas dan mineral.

Sementara itu sektor-sektor lainnya, seperti pertanian, industri, dan perdagangan, meskipun memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Bengkulu dan pemberdayaan masyarakat, namun hanya dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu. Sektor pertanian misalnya hanya memberikan kontribusi sekitar 10–12%, sektor industri dan perdagangan masing-masing berkontribusi sebesar 6–7% dan 14–17%. Tren ini menunjukkan pentingnya upaya diversifikasi ekonomi yang lebih terencana, agar Kabupaten Bengkulu tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan yang rentan terhadap perubahan harga global. Oleh karena itu, penguatan sektor-sektor sekunder dan tersier harus menjadi prioritas guna mewujudkan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan merata.

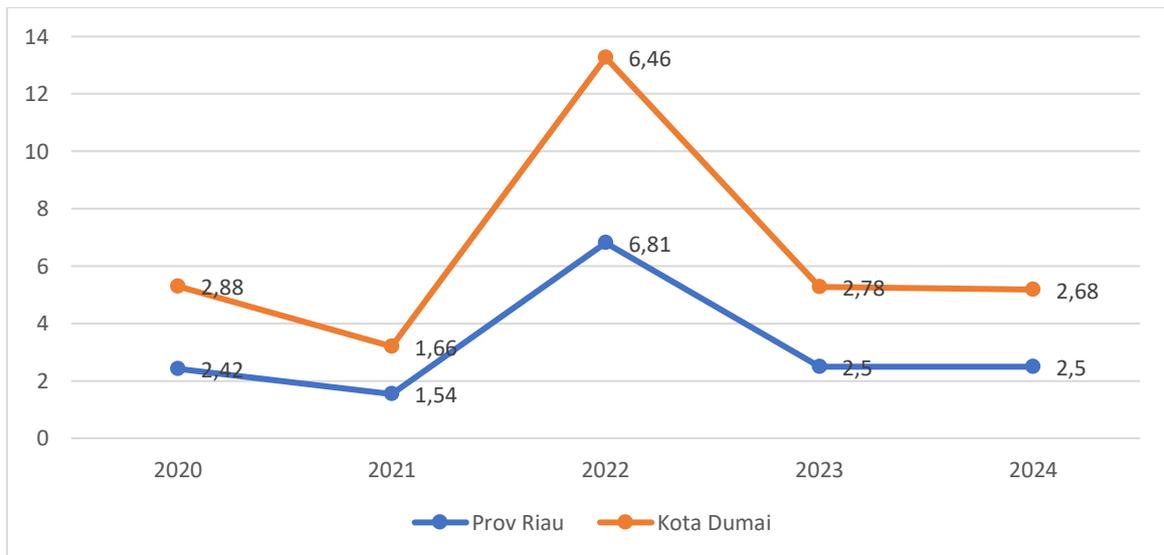
b) Inflasi.

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang terjadi ketika terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian dalam periode waktu tertentu. Proses ini mengarah pada penurunan daya beli uang, yang berarti dengan jumlah uang yang sama, masyarakat tidak dapat membeli barang dan jasa yang sama seperti sebelumnya. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan permintaan yang

melebihi kapasitas produksi (demand-pull inflation), peningkatan biaya produksi yang mempengaruhi harga barang dan jasa (cost-push inflation), atau bahkan faktor ekspektasi di mana masyarakat mengantisipasi kenaikan harga sehingga turut mendorong kenaikan harga lebih lanjut.

Dampak inflasi dapat terasa dalam berbagai sektor kehidupan, baik bagi konsumen, produsen, maupun perekonomian secara keseluruhan. Dalam kondisi inflasi yang moderat, perekonomian dapat berjalan dengan baik, tetapi jika inflasi terlalu tinggi atau tidak terkendali, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, peningkatan kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama kebijakan ekonomi di banyak negara.

Inflasi Kabupaten Bengkalis merujuk pada inflasi kota terdekat yaitu Kota Dumai. Ada perkembangan Infasi Kota Dumai selama kurun waktu 2020-2024 adalah seperti terlihat pada grafik berikut berikut:



Gambar III-3 Perbandingan Inflasi Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Gambar III. 3 di atas memperlihatkan bahwa Inflasi di Kota Dumai yang menjadi rujukan inflasi Kabupaten Bengkalis menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 2.88%, yang menggambarkan stabilitas harga yang masih dalam batas wajar, meskipun terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan angka inflasi ke angka 1.66%. Hal ini bisa jadi karena dipengaruhi oleh penurunan permintaan barang dan jasa akibat pembatasan sosial dan dampak dari kebijakan pandemi. Namun, pada tahun 2022, Kota Dumai mengalami lonjakan inflasi yang signifikan mencapai 6.46%. Lonjakan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain gangguan pada rantai pasokan barang global, meningkatnya harga energi, dan ketidakstabilan harga bahan pokok, yang merupakan efek dari pemulihan ekonomi setelah pandemi. Kemudian pada tahun 2023 inflasi kembali menurun menjadi 2.78%, dan pada tahun 2024 juga sedikit mengalami

penurunan yakni menjadi 2.68%. Keadaan ini menandakan adanya upaya pengendalian inflasi, meskipun masih terdapat beberapa tekanan yang mempengaruhi perekonomian Kota Dumai. Jika dibandingkan dengan Provinsi Riau, inflasi di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan yang sedikit lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

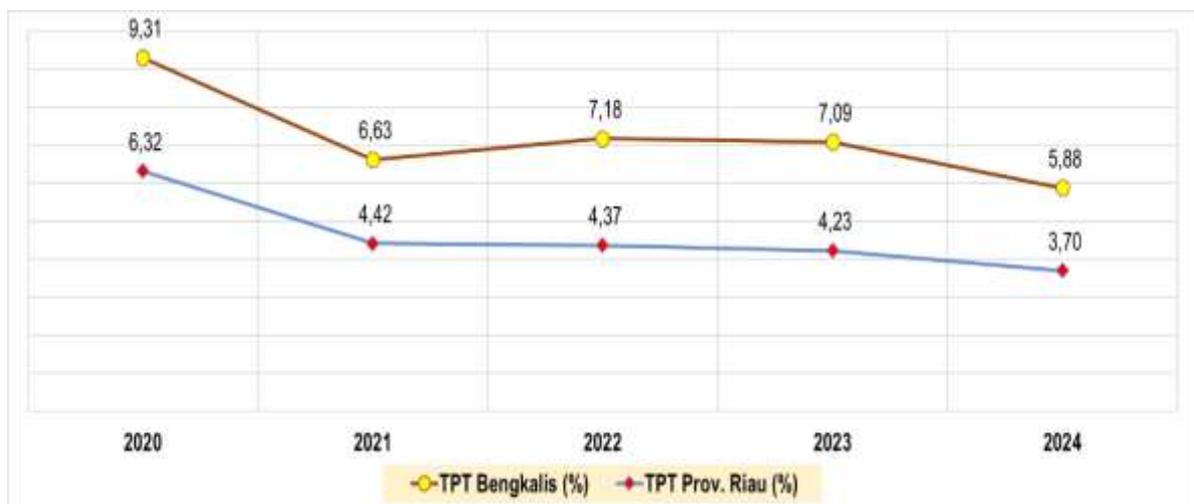
Secara keseluruhan, meskipun inflasi Kota Dumai mengikuti pola yang serupa dengan Provinsi Riau, perbedaan dalam tingkat inflasi menunjukkan bahwa Kota Dumai lebih rentan terhadap faktor eksternal dan lokal yang mempengaruhi kestabilan harga. Penguatan kebijakan ekonomi yang lebih spesifik, serta diversifikasi sumber daya ekonomi di kota tersebut, menjadi pilihan untuk membantu menurunkan tingkat inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang.

c) Angka Pengangguran.

Pengangguran terbuka merujuk pada situasi di mana individu yang aktif mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan meskipun telah berusaha dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sering diukur sebagai persentase dari jumlah angkatan kerja di suatu negara, yang memberikan gambaran mengenai seberapa besar proporsi tenaga kerja yang tidak dapat terserap oleh pasar kerja.

Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan pekerjaan yang tersedia, perubahan kondisi ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, serta masalah struktural yang ada dalam pasar tenaga kerja. Pengangguran terbuka memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian, antara lain menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya tingkat kemiskinan, serta terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



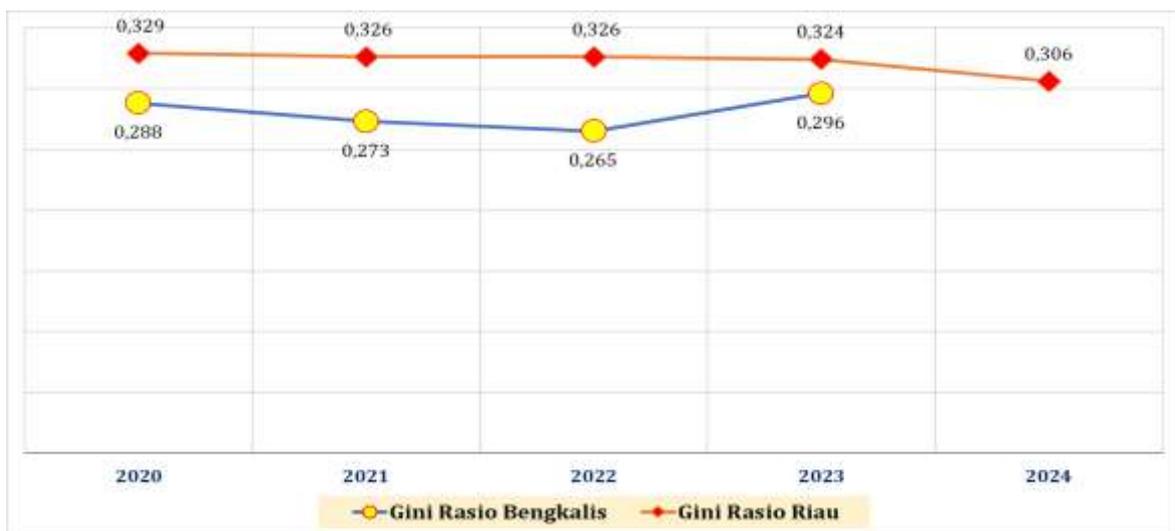
Gambar III-4 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi Riau

Gambar III.4 di atas memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2020- 2024 menunjukkan trend yang semakin menurun. Namun pada tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan yakni dari 6,63 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 7,18 persen . Namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau selama kurun waktu yang sama, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis konsisten di atas Provinsi Riau.

Kondisi ini disebabkan karena tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah lapangan pekerjaan secara signifikan. Rendahnya pertambahan lapangan pekerjaan ini disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu upaya-upaya untuk penciptaan lapangan pekerjaan menjadi agenda penting yang mesti dilakukan.

d) **Indek Gini Rasio.**

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu populasi atau negara. Ini adalah angka antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 mengindikasikan ketidaksetaraan sempurna (satu individu memiliki seluruh pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki pendapatan sama sekali). Pada umumnya, indeks Gini dianggap sebagai indikator penting dalam mengukur ketidaksetaraan ekonomi dan sering digunakan dalam analisis sosial dan ekonomi. Adapun Indek Gini Rasio Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III-5 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2020 – 2024

Gambar III. 5 di atas memperlihatkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Bengkalis menunjukkan fluktuasi dalam tingkat ketidaksetaraan pendapatan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, indeks Gini tercatat sebesar 0,288, yang menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2021, angka ini menurun

menjadi 0,273, menandakan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, dengan ketidaksetaraan yang sedikit berkurang.

Perbaikan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana indeks Gini mencapai angka 0,265, menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam ketidaksetaraan pendapatan di Kabupaten Bengkalis. Angka ini mencerminkan upaya yang lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Namun, pada tahun 2023, indeks Gini kembali meningkat menjadi 0,296, yang menunjukkan adanya kenaikan ketidaksetaraan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan, yang mengarah pada kesenjangan yang lebih besar.

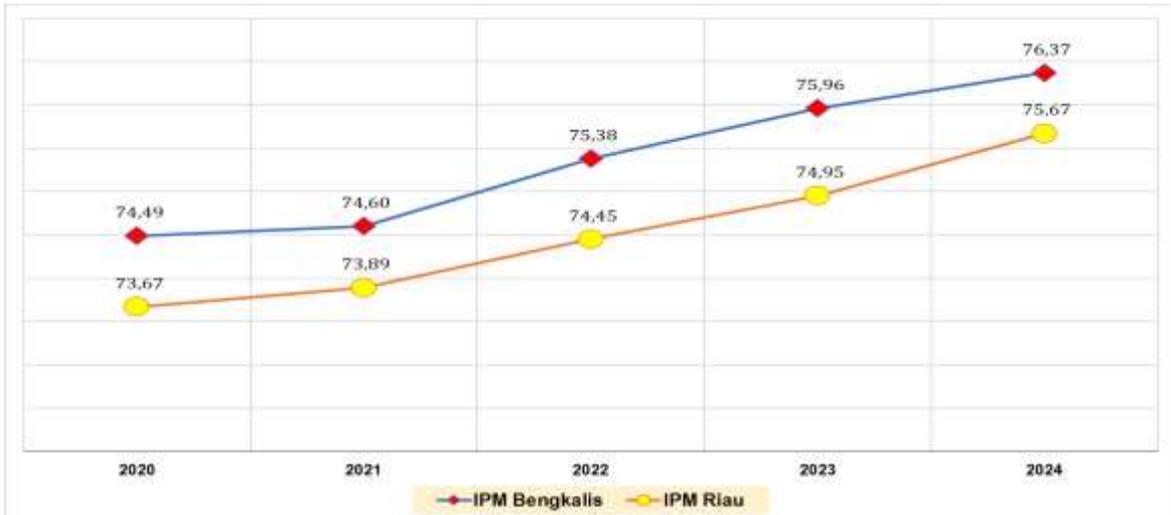
Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan ketidaksetaraan pada beberapa tahun terakhir, fluktuasi dalam indeks Gini menunjukkan bahwa perbaikan yang stabil dalam distribusi pendapatan masih perlu diperjuangkan untuk mencapai kesetaraan yang lebih merata di Kabupaten Bengkalis. Jika dibandingkan dengan indeks gini rasio Provinsi Riau terlihat bahwa indeks gini rasio Kabupaten Bengkalis konsisten lebih rendah.

e) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan suatu negara atau wilayah, dengan fokus pada kualitas hidup manusia. IPM menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang mencakup harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita. Pengukuran ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat dibandingkan hanya dengan menggunakan indikator ekonomi semata.

Melalui IPM, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam upaya pembangunan yang berfokus pada manusia. Indeks ini tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengkaji seberapa besar pembangunan tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, IPM menjadi alat yang penting bagi pemerintah dan lembaga internasional dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar III-6 Perbandingan IPM Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi Riau.

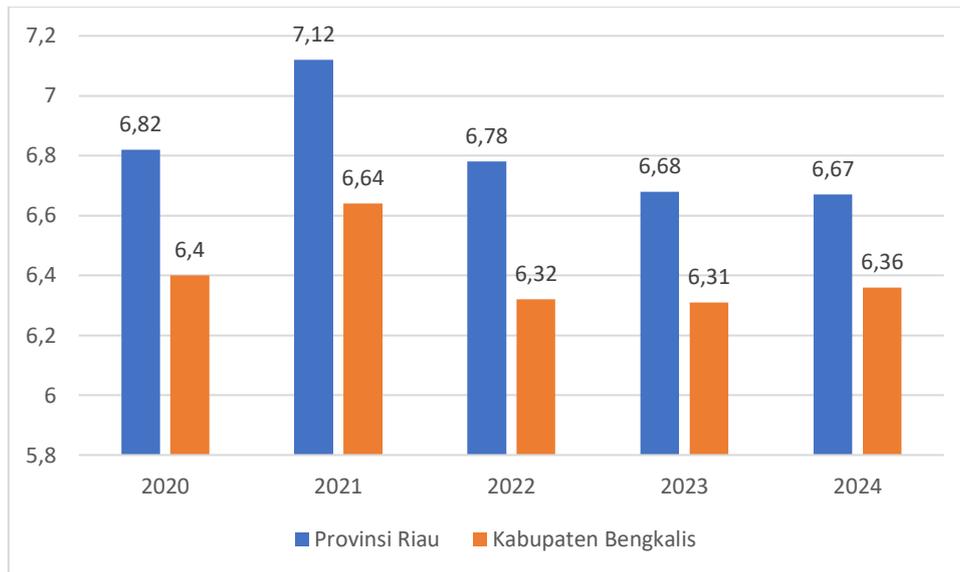
Gambar III-6 di atas memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 73,46, yang sedikit meningkat menjadi 73,58 pada tahun 2021. Selanjutnya, IPM terus mengalami peningkatan signifikan, mencapai 74,38 pada tahun 2022, dan 74,97 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, diperkirakan IPM Kabupaten Bengkalis terus meningkat dengan angka 75,28.

Peningkatan IPM yang terjadi setiap tahunnya mencerminkan adanya kemajuan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita di Kabupaten Bengkalis. Meskipun terdapat fluktuasi kecil pada tahun 2021, tren positif ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di daerah tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau, secara konsisten IPM Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu yang sama diatas Provinsi Riau.

f) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan bagian dari kondisi perekonomian masyarakat. Secara defenitif kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Adapun perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis periode 2020-2024 dapat dilihat pada Garfik berikut :



Gambar III-7 Perbandingan Kemiskinan antara Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi Riau

Gambar III-7 di atas dapat dilihat bahwa Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang cenderung stabil meskipun ada fluktuasi kecil antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 6,4%, yang kemudian sedikit meningkat menjadi 6,64% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, angka kemiskinan mengalami penurunan yang sangat kecil, dengan nilai masing-masing sebesar 6,32% dan 6,31%. Penurunan ini meskipun kecil menunjukkan adanya upaya yang terus menerus dalam mengurangi kemiskinan, meskipun tantangan sosial-ekonomi yang ada tetap berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Fluktuasi kecil pada angka kemiskinan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah daerah, program pengentasan kemiskinan, serta kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh situasi pasca-pandemi. Meski demikian, penurunan yang sangat minimal di tahun-tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan upaya yang lebih signifikan agar angka kemiskinan dapat lebih teratasi dalam beberapa tahun mendatang.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Tantang perekonomian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 dan 2026 adalah:

1. Perubahan kondisi ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik dapat berdampak signifikan pada ekonomi Kabupaten Bengkalis, terutama karena ketergantungan daerah tersebut pada sektor pertanian, perkebunan, dan kelapa sawit.
2. Tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan juga dapat menjadi faktor penting. Kabupaten ini mungkin dihadapkan pada tekanan untuk meningkatkan produksi sumber daya alamnya, sementara juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan.

3. Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi dan konektivitas internet, dapat membatasi pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi.
4. Perubahan iklim yang semakin memburuk dapat mengganggu pasokan air, mempengaruhi produksi pertanian, meningkatkan risiko bencana alam, dan mempengaruhi sektor ekonomi tertentu.
5. Inovasi teknologi yang cepat terus terjadi, yang dapat mengancam lapangan kerja tradisional dan menciptakan kesenjangan dalam keterampilan kerja antara generasi yang lebih muda dan yang lebih tua.
6. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran.
7. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi permasalahan di Kabupaten Bengkalis. Kondisi yang demikian menyebabkan sumber daya alam yang dimiliki belum dapat dikelola secara maksimal, sehingga belum sepenuhnya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan prospek perekonomian Kabupaten Bengkalis 2025 dan 2026 adalah sebagai berikut:

1. Ada potensi untuk diversifikasi ekonomi Bengkalis melalui pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan industri lainnya di luar sektor pertanian dan perkebunan. Peningkatan investasi dalam sektor-sektor ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor primer.
2. Peningkatan Investasi, jika pemerintah daerah dan nasional menerapkan kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan infrastruktur, maka prospek pertumbuhan ekonomi Bengkalis bisa lebih baik. Investasi ini dapat berupa pembangunan fasilitas transportasi, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian dan perkebunan, serta membuka peluang baru untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.
4. Kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan sektor swasta, dapat membantu memperkuat infrastruktur, menyediakan akses ke pasar baru, dan mendukung pengembangan ekonomi daerah.
5. Peningkatan pendidikan dan pelatihan dapat membantu mendorong inovasi, meningkatkan keterampilan pekerja, dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi diatas diproyeksikan perekonomian Kabupaten Bengkalis tahun 2025 adalah seperti tabel berikut :

Tabel III-1 Proyeksi Perekonomian Kabupaten Bengkalis 2025

No	Indikator Makro	Capaian Tahun 2024	Proyeksi pada RKPD 2025	Perubahan Proyeksi pada RKPD-P 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,93	2,08 – 2,15	1,59 - 2,83
2	PDRB Per kapita:			
	- ADHB (Juta Rupiah)	296,91	-	297,96 - 298,95
	- ADHK (Juta Rupiah)	132,98	-	133,35 - 135,5
3	Tingkat Inflasi (%)	2,36	3	2,2 - 2,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,88	6,7 – 6,8	5,54 - 5,72
5	Indeks Gini /Gini Ratio (Point)	0,279	0,265 – 0,270	0,259 - 0,262
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,67	5,63 – 5,78	6,27 - 6,33
7	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	76,37	76,23-76,42	76,65 - 76,73
8	Indeks Modal Manusia (Point)	-	0,56	-
9	Penurunan Emisi GRK (%)	-	13%	-
10	IKLH (angka)	68,57	-	73,5

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien. Pengeolaan keuangan ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan didaerah berkolerasi dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah atau kapasitas keuangan pemerintah daerah dan strategi penggunaannya. Oleh sebab itu daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah secara baik sehingga dapat melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah merujuk pada kapasitas atau kesiapan keuangan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kemampuan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan pendapatan, pengendalian pengeluaran, manajemen utang, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan.

Penerimaan atau pendapatan harus lah dikelola dengan baik. Oleh sebab itu berbagai kebijakan, diantaranya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi menjadi penting untuk dilakukan. Sedangkan pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan menetapkan prioritas belanja diantaranya belanja mandatori, belanja urusan wajib yang memberikan

dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Kebijakan keuangan Kabupaten Bengkalis pada Perubahan RKPD Tahun 2025 merujuk pada arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, khusus untuk penggalan tahun 2025. Prioritas yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang menjadi acuan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut penganggaran daerah Kabupaten Bengkalis didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor.
2. **Pendapatan Daerah:** Meningkatkan pendapatan daerah adalah prioritas utama. Kabupaten Bengkalis dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, termasuk pembaruan sistem perpajakan, pengawasan yang lebih ketat terhadap pembayaran pajak, dan peningkatan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3. **Pengelolaan Utang:** Pengelolaan utang yang bijaksana penting untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah.
4. **Efisiensi Pengeluaran:** Mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan serta meningkatkan efisiensi pengeluaran merupakan strategi penting untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya keuangan untuk program-program pembangunan yang lebih produktif.
5. **Prioritas Pembangunan:** Pengalokasian sumber daya keuangan yang tepat untuk proyek dan program yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah kunci.
6. **Diversifikasi Pendapatan:** Mendorong diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau sumber pendapatan tertentu.

Kebijakan keuangan daerah yang dilakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memaksimalkan belanja daerah yang efisien dan efektif. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut di Kabupaten Bengkalis adalah mengedepankan prinsip money follow program dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 dan prioritas pembangunan RKPD 2025. Dengan demikian kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis, dilihat dari pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun tertentu. Pada tahun berjalan 2025 telah ditetapkan anggaran pendapatan Kabupaten Bengkalis meningkat dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan tahun 2025 berdasarkan laporan realisasi semester I, maka diprognoiskan untuk enam bulan kedepan akan terdapat penambahan pendapatan yang berasal transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu pada tahun 2025 pendapatan secara keseluruhan diproyeksikan akan mengalami peningkatan dibandingkan pendapatan yang diperkirakan pada RKPD murni tahun 2025.

Adapun detail mengenai proyeksi pendapatan daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III-2 Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	JENIS PENDAPATAN	MURNI 2025	PERUBAHAN 2025	SELISIH Rp.	(%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	782.874.854.145	547.854.832.889	-235.020.021.256	- 30,02
	Pajak Daerah	246.532.500.000	248.532.500.000	2.000.000.000	0,81
	Retribusi Daerah	173.365.554.145	189.321.759.798	15.956.205.653	9,20
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	327.000.000.000	72.456.226.430	-254.543.773.570	- 77,84
	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.976.800.000	37.544.346.661	1.567.546.661	4,35
2	DANA TRANSFER	2.434.389.763.814	4.109.130.809.564	1.674.741.045.750	68,79
	Dana Transfer Pemerintah Pusat	2.262.305.040.000	3.965.204.231.511	1.702.899.191.511	75,27
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	172.084.723.814	143.926.578.053	-28.158.145.761	- 16,36
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.058.822.515.540	4.656.985.642.453	1.598.163.126.913	52,24

Sumber: *Bappeda Kabupaten Bengkalis 2023*

Merujuk pada tabel diatas Pendapatan Kabupaten Bengkalis, dilihat dari sisi proporsi tidak banyak mengalami perubahan dan tetap sebagian besar berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Keadaan ini dapat dipahami karena Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia, yang mendapatkan bagian dari hasil minyak dan gas sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan hasil laporan semester I, pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari , pendapatan asli daerah, transfer Pemerintah Pusat, transfer Provinsi pada perubahan RKPD tahun 2025 diproyeksikan akan lebih besar dibandingkan dengan yang di anggarkan dalam APBD Murni 2025. Dalam APBD murni tahun 2025 pendapatan di perkirakan sebesar Rp. 3.058.822.515.540 meningkat menjadi Rp 4.656.985.642.453 atau meningkat sebesar Rp. 1.598.163.126.913 dalam perubahan RKPD 2025. Proyeksi tersebut mendorong dilakukan perubahan supaya lebih mendekati pada kondisi

sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan proyeksi pendapatan daerah, maka harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pajak dan Retribusi: Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi adalah langkah penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan dan retribusi yang ada, termasuk melakukan pembaruan kebijakan, memperketat penegakan hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
- 2) Pembaruan Kebijakan Pajak: Evaluasi dan pembaruan kebijakan pajak dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Ini bisa mencakup penyesuaian tarif pajak, perluasan basis pajak, dan penerapan insentif pajak untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor-sektor tertentu.
- 3) Penyederhanaan Proses Perpajakan: Mempermudah proses perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi. Pemerintah daerah dapat memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih sederhana dan transparan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran pajak dan pelaporan.
- 4) Peningkatan Kualitas Layanan: Meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan retribusi. Hal ini termasuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, serta pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh.
- 5) Diversifikasi Sumber Pendapatan: Selain dari pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga perlu mencari sumber pendapatan alternatif. Ini bisa berupa pendapatan dari aset daerah, seperti sewa atau dividen dari perusahaan milik daerah, serta pendapatan dari sektor pariwisata atau sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan.
- 6) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Membangun kemitraan dengan pihak eksternal, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan, dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi bersama, pembiayaan proyek-proyek strategis, dan pengelolaan aset daerah.
- 7) Pendanaan Alternatif: Mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman, obligasi daerah, atau kemitraan publik-swasta juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam jangka panjang.
- 8) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, dengan memperkuat pengawasan dan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan efektivitas penggunaan aset daerah.
- 9) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan pendapatan selain dari pendapatan asli daerah.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut diatas diperkirakan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan asumsi tersebut perkiraan pendapatan daerah 2025 secara rinci disajikan sebagai berikut:

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mengelola anggaran belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Arah kebijakan belanja daerah berhubungan dengan proyeksi pendapatan daerah. Sebagaimana yang sudah sajikan pada tabel di atas pendapatan daerah pada Perubahan RKPD mdi proyeksikan meningkat maka berdampak pada meningkatnya alokasi belanja pada tahun anggaran 2025. Oleh sebab itu Penyesuaian proyeksi belanja pada perubahan RKPD tahun 2025 diproyeksikan akan mengalami peningkatan

Adapun proyeksi belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel III-3 berikut.

Tabel III-3 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	RKPD Murni 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah / Berkurang	%
1	BELANJA OPERASI	2.515.217.567.528	3.044.347.571.592	529.130.004.064	21
	Belanja Pegawai	1.255.329.325.490	1.406.186.109.146,95	150.856.783.657	12
	Belanja Barang dan Jasa	1.149.010.394.460	1.484.215.092.515,55	335.204.698.056	29,2
	Belanja Subsidi	12.040.485.840	5.000.000.000,00	-7.040.485.840	-58,5
	Belanja Hibah	71.789.376.170	124.156.969.929,00	52.367.593.759	72,9
	Belanja Bantuan Sosial	27.047.985.540	24.789.400.000,00	-2.258.585.540	-8,35
2	BELANJA MODAL	396.660.316.120	910.010.473.792	513.350.157.672	129
	Belanja Tanah	1.978.500.370	0	-1.978.500.370	-100
	Belanja Peralatan dan Mesin	40.901.619.160	210.741.210.956,00	169.839.591.796	415
	Belanja Gedung dan Bangunan	88.799.446.350	127.518.735.647,00	38.719.289.297	43,6
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	264.496.341.700	542.202.895.142,00	277.706.553.442	105
	Belanja Aset Tetap Lainnya	484.408.510	28.605.215.347,00	28.120.806.837	5805
	Belanja Aset Lainnya	396.660.316.120	942.416.700,00	-395.717.899.420	-99,8
3	BELANJA TAK TERDUGA	30.177.631.950	6.235.727.691	-23.941.904.260	-79,3
	Belanja Tak Terduga	30.177.631.950	6.235.727.690,50	-23.941.904.260	-79,3
4	TRANSFER	354.359.099.170	703.003.617.459	348.644.518.289	98,4
	Transfer Bagi Hasil ke Desa	26.128.595.170	41.490.070.335,00	15.361.475.165	58,8
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	328.230.504.000	661.513.547.124,00	333.283.043.124	102
	BELANJA DAERAH	3.296.414.614.770	4.663.597.390.533	1.367.182.775.763	41,5

Sumber; Bappeda Kabupaten Bengkalis 2023

Data di atas memperlihatkan sejalan dengan meningkatnya pendapatan belanja daerah juga mengalami peningkatan. Secara umum belanja meningkat dari Rp.3.296.414.614.770

dalam APBD murni 2025 meningkat menjadi Rp. 4.663.597.390.533 dalam Perubahan RPKD 2025. Dilihat dari jenis belanja, belanja operasi meningkat dari Rp.2.515.217.567.528 APBD murni 2025 meningkat menjadi Rp. 3.044.347.571.592 dalam perubahan RPKD 2025, belanja modal meningkat dari Rp. 396.660.316.120 APBD murni 2025 meningkat menjadi Rp. 910.010.473.792 dalam Perubahan RPKD 2025, belanja tak terduga berkurang dari Rp.30.177.631.950 APBD murni 2025 menjadi Rp. 6.235.727.690,50 dalam Perubahan RPKD perubahan 2025, belanja transfer meningkat dari Rp. 354.359.099.170 APBD murni 2025 meningkat menjadi Rp. 703.003.617.459 dalam Perubahan RPKD 2025.

Selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah yang diproyeksikan meningkat maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- 1) Tujuan Pembangunan: Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, atau pengurangan kesenjangan sosial.
- 2) Prioritas Pengeluaran: Menentukan sektor-sektor mana yang akan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan.
- 3) Efisiensi Pengeluaran: Memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil terbaik, termasuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.
- 4) Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait anggaran, sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka dapat tercermin dalam alokasi dana.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memberikan laporan yang jelas kepada public tentang bagaimana dana tersebut digunakan dan hasil yang telah dicapai.
- 6) Keterlibatan Pihak Terkait: Melibatkan pihak-pihak terkait seperti lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan sector swasta dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan belanja daerah
- 7) Fleksibilitas: Mempertimbangkan fleksibilitas dalam alokasi anggaran untuk dapat menanggapi perubahan kondisi ekonomi, sosial, ataupun politik yang terjadi di tingkat lokal atau nasional.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan RPKD Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan antara proyeksi SILPA

pada APBD murni Tahun 2025, dengan Perubahan RKPD 2025. Hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap APBD Tahun 2024 dan Silpa Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Tabel III-4 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2025

NO	URAIAN	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	125.451.086.875	6.611.748.080	-118.839.338.795	-95
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	124.251.086.875	5.411.748.080	-118.839.338.795	-96
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	125.451.086.875	6.611.748.080	-118.839.338.795	-95

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 Kabupaten Bengkalis mengacu pada sasaran pembangunan penggalan tahun ke 5 dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2025 Kabupaten Bengkalis juga disusun berdasarkan telaah terhadap: hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan RKPD tahun 2025 triwulan I; Capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 untuk tahun 2025 ;Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional yang bersumber kepada Rancangan Kerja Pembangunan Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2025; dan Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2025.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2025, perlu mempedomani dan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, Provinsi Riau, dan Kabupaten Bengkalis sendiri agar arah pembangunan dapat dilakukan secara sinergi antar jenjang pemerintahan. Keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi Riau dijelaskan berikut ini.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN tahun 2020-2024 mengusung visi yaitu:

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pokok rencana kerja pembangunan nasional tahun 2025 dengan tema yaitu: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan sejumlah Agenda Pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

A. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Sosial :

- a) Kesehatan untuk Semua; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
 - Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
 - Investasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Pustu, dan UKBM
 - Penurunan kematian ibu melalui penguatan pelayanan kesehatan maternal dan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif
 - Pengendalian penyakit menular terutama TB dan eliminasi penyakit tropis terabaikan terutama kusta dan Schistosomiasis
 - Penguatan pembiayaan kesehatan dan JKN.
- b) Pendidikan Berkualitas yang Merata; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
 - 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
 - 2) Restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru untuk mendorong pemerataan dan kualitas pendidikan
 - 3) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang berkualitas
 - 4) Peningkatan lulusan pendidikan menengah dan tinggi (STEAM) yang produktif dan berdaya saing
- c) Perlindungan Sosial yang Adaptif; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
 - 1) Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek
 - 2) Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat
 - 3) Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan
 - 4) Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan

B. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Ekonomi

- a) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Produktivitas Ekonomi; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Penguatan hilirisasi industri berbasis SDA (a.l nikel, tembaga, bauksit, sawit, karet, kelapa, kakao, dan rumput laut)
 - 2) Peningkatan industri padat teknologi dan inovasi (logam dasar; kimia dasar; elektronik dan digital; kimia hilir dan farmasi; alat angkut; serta kedirgantaraan)
 - 3) Pengembangan ekonomi biru indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru
 - 4) Pengembangan bioekonomi dan bioteknologi
 - 5) Pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, regeneratif bali dan klaster pariwisata IKN (a.l Danau Toba, Borobudur, Lombok, Gili Tramen, Manado-likupang, Bangka Belitung, Wakatobi, BTS, Raja Ampat, Morotai, Bali, dan IKN)
 - 6) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual (seni, budaya, dan kerajinan; film, animasi, dan visual arts; kuliner; serta aplikasi dan gim)
 - 7) Pengembangan industrialisasi perikanan dan kelautan
 - 8) Pengembangan koperasi sektor produksi
 - 9) Peningkatan peran UMKM dalam rantai nilai industri
 - 10) Pengembangan wirausaha berorientasi tumbuh
 - 11) Penguatan vokasi sesuai dunia usaha
 - 12) Peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan

C. Penciptaan ekosistem dan peningkatan anggaran iptek serta inovasi

- a) Penerapan Ekonomi Hijau; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Penerapan ekonomi sirkular
 - 2) Percepatan transisi energi
 - 3) Penerapan transportasi hijau
- b) Transformasi Digital; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Pengembangan superplatform digital indonesia
 - 2) Peningkatan kualitas infrastruktur TIK
 - 3) Penciptaan enabler transformasi digital
 - 4) Penguatan SDM digital
 - 4) Peningkatan adopsi teknologi digital pada berbagai sektor
- c) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi
 - 2) Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
 - 3) Penguatan logistik nasional
 - 4) Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara
 - 5) Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antardaerah dan dengan global
 - 6) Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
 - 7) Peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global
 - 8) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global
- d) Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Peningkatan kualitas 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado)
 - 2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
 - 3) Pengentasan rumah tidak layak huni
 - 4) Pembiayaan perumahan untuk semua
 - 5) Pengentasan permukiman kumuh
 - 6) Penyediaan perumahan publik terjangkau
- D. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Tata Kelola; Prioritas pembangunan untuk transformasi Tata Kelola adalah Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, dengan beberapa intervensi yang menjadi penekanan adalah :
- 1) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi nasional dan penyederhanaan tata kelola regulasi;
 - 2) Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN;
 - 3) Penataan proses bisnis dan kelembagaan KL berdasarkan Prioritas Nasional/ shared outcome (manajemen kinerja, manajemen anggaran, Manajemen resiko, dan sistem insentif KL atas pencapaian target);
 - 4) Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan penerapan sistem GRC/ Governance, Risk and Compliance);
 - 5) Penerapan single salary system dan reformasi sistem pensiun;
 - 6) Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi dan penerapan Sistem Integritas Partai Politik
- E. Prioritas Pembangunan untuk Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

- a) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Single prosecution system melalui penguatan kewenangan kejaksaan, kapasitas jaksa, dan pemenuhan sarana prasarana penanganan perkara
 - 2) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri, keamanan insani, keamanan laut, dan keamanan siber
 - 3) Penguatan kebebasan sipil yang berwawasan Pancasila, penguatan kesetaraan kelompok rentan untuk akses informasi dan keterwakilan politik, serta penguatan kapasitas, fungsi, dan integritas Lembaga demokrasi
- b) Stabilitas Ekonomi Makro; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Reformasi perpajakan (penambahan kelembagaan administrasi perpajakan)
 - 2) Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran
 - 3) Transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
 - 4) Pengendalian inflasi dengan fokus penyelesaian masalah struktural (pasokan dan distribusi), penguatan data, serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi pusat & daerah
 - 5) Peningkatan kontribusi keuangan syariah dan inklusi keuangan
- c) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Peningkatan efektivitas kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global
 - 2) Penguatan kerja sama pembangunan internasional dan diplomasi ekonomi
 - 3) Pemenuhan infrastruktur penopang kebijakan luar negeri
 - 4) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
 - 5) Peningkatan kemampuan pertahanan

F. Prioritas Pembangunan untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- a) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya
 - 2) Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jatidiri bangsa
 - 3) Menjamin hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
 - 4) Penguatan moderasi beragama
 - 5) Transformasi penjaminan produk halal
 - 6) Pengembangan dana sosial keagamaan produktif
- b) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya
 - 2) Penguatan institusi keluarga dalam penanaman nilai, moral, etika, integritas, karakter, dan pengembangan psikososial anak
 - 3) Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
 - 4) Pengembangan masyarakat inklusif terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya
- c) Lingkungan Hidup Berkualitas Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Pencegahan kerusakan dan konservasi ekosistem dan spesies
 - 2) Sistem Peringatan Dini Slow On Set LH dan peningkatan Kesehatan laut
 - 3) Perbaikan kualitas ekosistem dan LH
 - 4) Penegakan Hukum Lingkungan
 - 5) Pembangunan Forest dan Sponge City di Ibu Kota Nusantara
 - 6) Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
 - 7) Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir menuju Circular Economy
- d) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Menjamin ketahanan energi nasional melalui peningkatan ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, dan tingkat penerimaan energi
 - 2) Meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional (Kawasan Sentra Produksi Pangan, pangan lokal, pangan akuatik/blue foods)
 - 3) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan (diversifikasi, keamanan, dan fortifikasi pangan)
 - 4) Penguatan tata kelola pangan (susut dan limbah pangan, serta Satu Data Pangan)
 - 5) Pembangunan dan revitalisasi tampungan air alami dan buatan
 - 6) Penuntasan pemanfaatan air baku, irigasi, dan listrik dari bendungan terbangun
 - 7) Penyediaan air baku DKI Jakarta dari wilayah sungai di Banten dan Jawa Barat (Interbasin transfer)
 - 8) Rehabilitasi hutan dan lahan
 - 9) Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana
- e) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim; Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut
 - 2) Pencegahan penyakit menular akibat iklim
 - 3) Pertanian ramah iklim

- 4) Pembangunan dan konservasi sumber daya air
- 5) Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestik
- 6) Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
- 7) Restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang)
- 8) Peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan sistem peringatan dini terpadu bencana
- 9) Penguatan manajemen tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

Indikator Pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:

- 1) Rasio PDB Industri Pengolahan sebesar 20,8 %
- 2) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif sebesar 7,9%
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 %;
- 4) Tingkat Inflasi sebesar $2,5 \pm 1,0$
- 5) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,458
- 6) Persentase Penurunan Emisi GRK sebesar
 - a. Kumulatif 28,12 %
 - b. Tahunan 32,65 %
- 7) Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0 %;

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025

Penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional sebagai wujud dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki link and match dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau 2025-2026, juga mengacu pada tema RKP Nasional tahun 2025.

Tujuan pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam RPD Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
- 2) Meningkatkan pembangunan budaya melayu
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur
- 4) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- 5) Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif
- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau di ukur dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 25 tahun	Tahun	9,5
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,54
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,56
		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,45
		Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	77,11
2.	Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Melayu	Meningkatnya Ketahanan Kebudayaan Melayu	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	Persen	54,54
		Meningkatnya Ekspresi dan Warisan Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	47,69
			Nilai Warisan Budaya	Nilai	57,40
3	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang Melalui Terminal/Dermaga/Bandara Pertahun	Persen	1,79
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber air minum	Persen
			Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
		Meningkatnya Akses Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	Persen	95,68
4	Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,41
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	17,94
5	Mewujudkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dan Inklusif	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Dan Menurunkan Kesenjangan	PDRB perkapita	Dalam juta Rupiah	160,97
			Indeks Gini	Indeks	303
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	167,52
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Juta Rupiah	188,62
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	72,37
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Poin	0,8289
			Tingkat Pengangguran Terbuka		4,05
		Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Dan Nusantara	Milyar/Rupiah	26.947,14
6	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak Dengan ASN Yang Profesional	Nilai Survey Penilaian Integritas	Persen	66,07
			Nilai Survey Indeks BerAKHLAK	Persen	60,90
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	86,15
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Digital yang Lincah Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,06

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
			Capaian Akutabilitas Kinerja	Nilai	73,03
			Capaian Akutabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP

Kunci keberhasilan RKP Provinsi Riau tahun 2025 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan untuk tahun 2025 yaitu:

Tabel IV-2 Indikator Makro RKP Dengan RKP Provinsi Riau Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RKP 2025	TARGET 2025	
			RPD	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	3,67	3,90 - 4,23
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	4,05	3,91 - 4,05
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	6,51	5,19 - 6,19
4	Ratio Gini (Poin)	0,379 – 0,382	0,303	0,318-0,324
5	Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,56		
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	38,6	17,94	17,94

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, maka Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas terutama dalam menciptakan kesempatan kerja, mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mempercepat pemerataan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Dengan prioritas yang harus di dukung oleh kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 sebagai berikut;

1. Prioritas I : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM, yang difokuskan kepada: Pemenuhan Prasarana dasar, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender.
2. Prioritas II : Peningkatan Tata Kelola, yang difokuskan kepada : Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
3. Prioritas III : Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang difokuskan kepada: Pemenuhan Infrastruktur, Kualitas Lingkungan Hidup,
4. Prioritas IV : Penguatan Ekonomi yang difokuskan kepada : Pertanian, Hilirisasi SDA, Penguatan Ekonomi masyarakat, Pariwisata Berbudaya Melayu

Dari prioritas dan fokus pembangunan diatas, dijabarkan ke dalam bentuk prioritas, sasaran, arah kebijakan, fokus kebijakan dan target kinerja yang disinkronkan dengan kebijakan daerah.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 maka hal ini mengacu pada visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026, yang juga berpedoman pada visi RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Bengkalis, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 juga merupakan kristalisasi dari komitmen pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah seperti termuat di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”

Agar pencapaian Visi Pembangunan 2021-2026 dapat dilaksanakan dengan baik, maka ditetapkanlah sejumlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian tersebut. Dimana keterhubungan misi, tujuan dan sasaran dapat dijelaskan pada Tabel IV-2. berikut ini.

Tabel IV-3 Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dengan Prioritas Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas
1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian	1.1 Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	1.1.1.1 Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah	1.1.1.1.1. Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan menjamin keberlangsungan usaha masyarakat.	1.1.1.1.1.1. Menumbuhkan dan Mengembangkan Industri Kreatif.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
			1.1.1.1.2. Peningkatan	1.1.1.1.2.1. Meningkatkan kualitas	Peningkatan Kualitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas
			kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal, buruh dan pekerja informal.	kelembagaan pelatihan kerja.	Sumber Daya Manusia
				1.1.1.1.2.2. Memfasilitasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
			1.1.1.1.3. Penguatan ekonomi petani dan nelayan.	1.1.1.1.3.1. Memberikan stimulus ekonomi, penyediaan sarana prasarana, pengembangan teknologi dan inovasi pendukung usaha pertanian dan perikanan.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
				1.1.1.1.3.2. Melaksanakan kerjasama pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
			1.1.1.1.4. Penyediaan lahan pertanian pada kawasan hutan.	1.1.1.1.4.1. Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
			1.1.1.1.5. Penguatan sektor kepariwisataan unggulan	1.1.1.1.5.1. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi pendukung pengembangan promosi wisata pantai, kuliner warisan budaya lokal.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
				1.1.1.1.5.2. Mengembangkan dan mengimplemantasikan model tata kelola potensi wisata terpadu	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas
			1.1.1.1.6. Penataan kelembagaan dan penguatan produktivitas sub sektor ekonomi kreatif.	1.1.1.1.6.1. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk perluasan jangkauan promosi produk usaha mikro dan kecil serta menengah.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
				1.1.1.1.6.2. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung produktivitas usaha mikro dan kecil serta menengah.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
			1.1.1.1.7. Penguatan peran BUMDes dalam peningkatan PAD desa dan soko perekonomian masyarakat perdesaan.	1.1.1.1.7.1. Melaksanakan peningkatan inovasi unit usaha, kompetensi SDM dan modernisasi manajemen BUMDes.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
			1.1.1.1.8. Penguatan pertumbuhan ekonomi spasial.	1.1.1.1.8.1. Melaksanakan penyiapan, penataan dan pengembangan kawasan khusus seperti: kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis potensial lainnya	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
		1.1.1.2 Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi	1.1.2.1.1. Penguatan kemampuan daya beli masyarakat	1.1.2.1.1.1. Meningkatkan struktur sosial ekonomi masyarakat di perdesaan dan kelurahan.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
				1.1.2.1.1.2. Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas
					Kapasitas Fiskal Daerah
			1.1.2.1.2. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	1.1.2.1.2.1. Menjamin ketersediaan Pangan bagi masyarakat	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah
	1.2 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing	1.2.1.1 Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing	1.2.1.1.1. Peningkatan kualitas standard pelayanan minimal pendidikan.	1.2.1.1.1.1. Mengupayakan kesinambungan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak tempatan dan berprestasi.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1.2.1.1.1.2. Fasilitasi cakupan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya pada jenjang PAUD.				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
1.2.1.1.1.3. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standard pendidikan.				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
1.2.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1.2.2.1.1. Peningkatan layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan	1.2.2.1.1.1. Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
			1.2.2.1.1.2. Fasilitasi ketercakupan jumlah, dan kompetensi tenaga kesehatan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas	
			1.2.2.1.2. Peningkatkan keterpaduan penanganan stunting, serta penyelenggaraan PHBS dan pelayanan gizi berbasis masyarakat.	1.2.2.1.2.1. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Posyandu dalam keterpaduan penanganan stunting, serta penyelenggaraan PHBS dan pelayanan gizi masyarakat.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
	1.3 Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan asset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif	1.3.1.1 Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset	1.3.1.1.1. Peningkatan upaya penerimaan PAD.	1.3.1.1.1.1. Melaksanakan peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah	
				1.3.1.1.1.2. Menyesuaikan semua regulasi daerah terkait penerimaan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional dan provinsi serta potensi-potensi penerimaan daerah.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah	
					1.3.1.1.1.3. Reformulasi tata kelola pendapatan, penggunaan belanja dan pembiayaan daerah yang efektif dan efisien.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah
				1.3.1.1.2. Penguatan tata kelola aset dan kekayaan daerah yang baik, efektif dan efisien.	1.3.1.1.2.1. Melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan aset dan kekayaan daerah tepat guna.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas
		1.3.1.2 Terciptanya iklim investasi yang kondusif	1.3.2.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.	1.3.2.1.1.1. Menyederhanakan perizinan dan menguatkan sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah
2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter	2.1 Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	2.1.1.1 Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan pemerintah	2.1.1.1.1. Penguatan akselerasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	2.1.1.1.1.1. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah
			2.1.1.1.2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.	2.1.1.1.2.1. Melaksanakan sinergitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah
			2.1.1.1.3. Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien, professional.	2.1.1.1.3.1. Restrukturisasi dan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang berazaskan kelayakan, efektif dan efisien.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah
				2.1.1.1.3.2. Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non Kependudukan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah
			2.1.1.1.4. Penguatan sistem	2.1.1.1.4.1. Meningkatkan kompetensi	Peningkatan Kualitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas
			penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan capaian kinerja.	aparatur dengan pendidikan dan pelatihan yang profesional dan terukur hasilnya.	Sumber Daya Manusia
			2.1.1.1.5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1.5.1. Menyediakan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah
	2.2 Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Harmonis.	2.2.1.1 Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu.	2.2.1.1.1. Penguatan peran dan partisipatif agamawan dan kelompok-kelompok masyarakat.	2.2.1.1.1.1. Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2.2.1.1.2. Introduksi nilai-nilai budaya melayu pada dunia pendidikan.			2.2.1.1.2.1. Mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada kurikulum muatan lokal di jenjang usia dini, dasar dan lanjut.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
2.2.1.1.3. Pelestraian peninggalan sejarah kebudayaan melayu.			2.2.1.1.3.1. Melaksanakan pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap bangunan dan benda cagar budaya (BCB) bersitus kebudayaan melayu.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah	
2.2.1.1.4. Penguatan sinergi			2.2.1.1.4.1. Melaksanakan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas
			pemajuan kebudayaan melayu dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya.	peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya.	
		2.2.1.2 Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olah raga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	2.2.2.1.1. Peningkatan kualitas atlet muda pada cabang olah raga prestasi	2.2.2.1.1.1. Menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan dan pembinaan yang berkesinambungan sesuai dengan standard nasional.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
			2.2.2.1.2. Penguatan kinerja pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda.	2.2.2.1.2.1. Fungsionalisasi kelembagaan serta peran dan fungsi Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNKK).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
				2.2.2.1.2.2. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelompok dan organisasi kepemudaaan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		2.2.1.3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	2.2.3.1.1. Penguatan agenda perempuan berdaya keluarga sejahtera.	2.2.3.1.1.1. Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3 Mewujudkan Penyediaan	3.1 Meningkatkan	3.1.1.1 Tersedianya		3.1.1.1.1.1. Fasilitasi peningkatan	Penyediaan Infrastruktur

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas	
Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat	kualitas konektivitas wilayah.	infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik	3.1.1.1.1. Penguatan kualitas jaringan jalan dan jembatan antar kawasan dan antar wilayah.	kualitas jalan (jembatan) strategis pada kluster kawasan yang bersumber dari anggaran non APBD.	dan Penataan Kawasan yan Berkelanjutan	
				3.1.1.1.2. Mengembangkan jaringan jalan poros, jembatan dan penataan drainase pada wilayah kecamatan dan perdesaan.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yan Berkelanjutan	
			3.1.1.1.2. Penguatan jaringan infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah perbatasan	3.1.1.1.2.1. Mengupayakan pemerataan penyediaan serta fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah LOKPRI (perbatasan).	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yan Berkelanjutan	
		3.1.1.2 Meningkatkan kapasitas angkutan penyeberangan.	3.1.2.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan penyeberangan.	3.1.2.1.1.1. Mengembangkan sistem pelayanan jasa transportasi ro-ro yang lebih memadai.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yan Berkelanjutan	
		3.2 Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	3.2.1.1 Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas.	3.2.1.1.1. Revitalisasi perumahan rakyat.	3.2.2.1.1.1. Fasilitasi penyediaan; serta rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yan Berkelanjutan
					3.2.1.1.2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang tertata baik.	3.2.1.1.2.1. Menata kawasan permukiman perkotaan kecil dan permukiman kumuh.
				3.2.1.1.2.2. Melaksanakan penanganan berkelanjutan abrasi sempadan	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yan Berkelanjutan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas
				sungai dan pantai yang berdampak langsung/tidak langsung kepada kelangsungan kawasan permukiman.	
			3.2.1.1.3. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana utilitas umum kawasan permukiman.	3.2.1.1.3.1. Mengupayakan penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang Berkelanjutan
				3.2.1.1.3.2. Melaksanakan pemberdayaan desa dan kelurahan dalam pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang Berkelanjutan
				3.2.1.1.3.3. Mengupayakan pembangunan dan pengembangan Duri Central Park sebagai ruang hijau terbuka publik perkotaan kecil.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang Berkelanjutan
			3.2.1.1.4. Penguatan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.	3.2.1.1.4.1. Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air bersih bagi rumah tangga.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang Berkelanjutan
			3.2.1.1.5. Pengoptimalan pengelolaan persampahan permukiman.	3.2.1.1.5.1. Menyediakan sarana dan prasarana; serta mengembangkan sistem pengelolaan persampahan yang berkualitas.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang Berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas
		3.2.1.2 Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	3.2.2.1.1. Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.	3.2.2.1.1.1. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang Berkelanjutan
				3.2.2.1.1.2. Memfungsikan dengan baik Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang Berkelanjutan
				3.2.2.1.1.3. Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang repsonsif dan dinamis.	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang Berkelanjutan
			3.2.2.2.2. Peningkatan tata kelola potensi lestari kawasan perbatasan.	3.2.2.2.2.1. Kemitraan pengembangan potensi kawasan perbatasan yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yang Berkelanjutan

Sasaran indikator pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Perbandingan target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 Kabupaten Bengkalis dengan sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel IV-4 Sasaran Indikator Pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis 2025 dengan sasaran RKP 2025

No	Indikator Makro	RKP Tahun 2025	Perubahan Proyeksi pada RKPD-P 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	1,59 - 2,83
2	PDRB Per kapita:		
	- ADHB (Juta Rupiah)		297,96 - 298,95
	- ADHK (Juta Rupiah)		133,35 - 135,5
3	Tingkat Inflasi (%)	2,5%	2,2 - 2,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	5,54 - 5,72
5	Indeks Gini /Gini Ratio (Point)	0,379 – 0,382	0,259 - 0,262
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0	6,27 - 6,33
7	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	-	76,65 - 76,73
8	Indeks Modal Manusia (Point)	0,56	-
9	Penurunan Emisi GRK (%)	38,6	-
10	IKLH (angka)	-	73,5

4.1.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Menyusun Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bengkulu. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning.

Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan Program yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk selanjutnya diintegrasikan .

Program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu. Berikut ringkasan pokok pikiran Anggota Dewan Kabupaten Bengkulu untuk tahun 2025.

Tabel IV-5 Konsistensi Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
Peningkatan Pelayanan pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kualitas Sektor Pertanian, Perkebunan dan UMKM yang mendorong kesejahteraan dan perekonomian masyarakat kecil dan menengah.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif Daerah
Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Pulau	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan Kawasan yan Berkelanjutan
Penguatan hukum pada Perlindungan Anak dan Perempuan korban tindak kekerasan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah.
Kebijakan stabilitas pasokan dan Harga Bahan Pokok masyarakat.	

4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis mempedomani RKP dan RKPD Provinsi Riau tahun 2025, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis. Tema RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2025 yaitu:

“Memantapkan kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur, Tatakelola Pemerintahan dan perekonomian masyarakat menuju Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera”.

Tema RKPD tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2025 mengusung 4 prioritas pembangunan yaitu: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital serta perbaikan kapasitas fiskal daerah;

- Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah strategis
- Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif

Keselarsan rencana kerja pembangunan Kabupaten dengan pembangunan provinsi dan nasional adalah vital untuk menjamin sinergi pembangunan negara secara keseluruhan. Untuk dapat melihat sinkronisasi data keselarsan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan RKPD.

Tabel IV-6 Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kab. Bengkalis
Tema	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi	Memantapkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, Tatakelola Pemerintahan dan perekonomian masyarakat menuju Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera
Prioritas	SDM Berdaya Saing dan Produktif	Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas sdm	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia
		Peningkatan tata kelola	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital sertaperbaikankapasit asfiskaldaerah;
	Infrastruktur Untuk Peningkatan Produktifitas	Pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah strategis
	Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk ramah Lingkungan	Penguatan ekonomi	Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif
Arah Kebijakan	1 Transformasi Sosial		
	Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun	Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
		Penyelenggaraan pendidikan inklusif	Penyelenggaraan pendidikan yang

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kab. Bengkalis
			berkualitas dan berkeadilan
		Peningkatan Literasi masyarakat	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kearifan lokal
	Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan	Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
		Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	
	Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		Fasilitas percepatan pelayanan SPAM Regional	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik)
		Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik	
	Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif		
	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas		

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kab. Bengkalis
	Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system	Peningkatan kualitas lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)	
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		
	Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi Pekerti)	Menumbuh kembangkan pengamalan kehidupan beragama	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
2	Transformasi Ekonomi		
	Penetapan hub. laut dan hub. Udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Peningkatan kualitas konektivitas antar wilayah yang didukung oleh sarana transportasi secara efisien dengan jaringan konektivitas provinsi dan nasional
		Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi Desa	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
		Peningkatan kerjasama antar Desa	
	Penguatan infrastruktur digital		
	Pengembangan infrastruktur transisi energi	Peningkatan akses dan infrastruktur Energi	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi daerah, khususnya pengembangan industri, perdagangan dan jasa, antara lain listrik, air bersih, perumahan, pengolahan limbah dan pusat pelatihan kerja
		Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau	

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kab. Bengkalis
	Percepatan infrastruktur IKN		
3	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		
	Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu kehilir	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	Membangun system pencegahan dan pengendalian pencemaran serta upaya pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
	Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)		
	Pengembangan skema graduasi bansos		
	Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya	Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
	Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenagakerja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling.
		Penambahan lapangan pekerjaan	
		Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenagakerja	
	Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kab. Bengkalis
	Percepatan investasi dan ekspor non migasproduk lahan	Peningkatan iklim dan promosi investasi	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal&nonfiskal bagi investasi di Daerah
	Peningkatan produksi industry pengolahan	Peningkatkan nilai tambah dan kualitas produk industri	
		Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri	Pengembangan kawasan industri Buruk Bakul dan penyediaan infrastruktur penunjang lain yang saling terintegrasi dengan pusat-pusat perekonomian daerah
	Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif		
	Penyediaan Infrastruktur untukmendukung Transisi Energi	Meningkatkan kemantapan jalan	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
		Peningkatan Profesionalisme ASN	Penguatan tata kelola pemerintah daerah yang adaktif dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahdaerah yang transparan profesional, akuntabel dan bebaskorupsi
		Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan	
		Penataan manajemen ASN	
		Peningkatan pelayanan public inklusi	
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	
		Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital

Uraian	Nasional	Provinsi Riau	Kab. Bengkalis
		Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

Tabel IV-7 Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Urusan	Program	Pagu APBD2025 (Rp.)	Pagu Perubahan RKPD 2025 (Rp.)	Selisih
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Terwujudnya SDM yang unggul dan Berkeadilan	Indeks Modal Manusia	0,56	PENDIDIKAN	Program pengelolaan pendidikan	171.542.843.471,00	311.250.386.422,50	139.707.542.951,50
				KESEHATAN	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	150.209.633.810,00	287.021.987.274,00	136.812.353.464,00
					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	41.911.428.562,00	44.915.723.680,00	3.004.295.118,00
					Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	199.948.476,00	751.434.238,00	551.485.762,00
					Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	349.952.000,00	564.477.472,00	214.525.472,00
	Terlaksananya Jaminan Sosial Bagi Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	5,63 - 5,78 %	SOSIAL	Program pemberdayaan sosial	3.753.049.632,00	3.427.600.470,00	-325.449.162,00
					Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	7.999.000,00	3.225.000,00	-4.774.000,00
					Program rehabilitasi sosial	3.155.161.988,00	1.639.162.239,00	- 1.515.999.749,0
					Program perlindungan dan jaminan sosial	28.567.022.488,00	27.697.534.079,00	-869.488.409,00
					Program penanganan bencana	1.192.617.524,00	649.302.581,00	-543.314.943,00
					Program pengelolaan taman makam pahlawan	473.785.532,00	529.044.719,00	55.259.187,00

Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Urusan	Program	Pagu APBD2025 (Rp.)	Pagu Perubahan RKPD 2025 (Rp.)	Selisih
Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik serta perbaikan kapasitas fiskal daerah;	Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Manajemen Pembangunan daerah yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	3,89	PERENCANAAN	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3.855.294.942,00	3.416.201.535,00	-439.093.407,00
					Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	4.479.816.741,00	2.260.231.386,00	-2.219.585.355,00
				KEUANGAN	Program pengelolaan keuangan daerah	403.029.141.576,00	661.987.346.790,00	258.958.205.214,00
					Program pengelolaan barang milik daerah	5.999.668.534,00	2.631.182.357,00	-3.368.486.177,00
					Program pengelolaan pendapatan daerah	8.150.988.062,00	5.713.946.387,00	- 2.437.041.675,00
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Program pengembangan sumber daya manusia	1.251.814.918,00	993.337.948,00	- 258.476.970,00
				KECAMATAN	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.280.418.082,00	7.265.483.017,00	-2.014.935.065,00
					Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	56.438.295.424,00	53.671.048.719,00	-2.767.246.705,00
					Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	2.888.965.168,00	2.327.622.175,00	- 561.342.993,00
					Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.175.044.233,00	4.848.470.681,00	-2.326.573.552,00
					Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	871.033.517,00	485.005.361,00	- 386.028.156,00
							2,08 - 2,15	

Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Urusan	Program	Pagu APBD2025 (Rp.)	Pagu Perubahan RKPD 2025 (Rp.)	Selisih
Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif	Pengembangan potensi Pariwisata dan agroindustri daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	294,38	TENAGA KERJA	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.630.508.506,00	973.222.675,00	- 657.285.831,00
					Program penempatan tenaga kerja	259.408.628,00	145.790.924,00	- 113.617.704,00
					Program hubungan industrial	5.118.104.716,00	6.499.697.002,00	1.381.592.286,00
		PDRB per Kapita (Rp Juta)	17 – 18%	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	699.963.282,00	84.499.825,00	- 615.463.457,00
					Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	429.999.861,00	0,00	- 429.999.861,00
					Program pendidikan dan latihan perkoperasian	299.999.337,00	0,00	- 299.999.337,00
					Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	359.999.409,00	0,00	- 359.999.409,00
					Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	2.455.012.049,00	879.999.156,00	- 1.575.012.893,00
					Program pengembangan umkm	467.915.755,00	0,00	- 467.915.755,00
					Rasio Gini (indeks)	0,265 - 0,270 poin	PERINDUSTRIAN	Program perencanaan dan pembangunan industri
		Program pengendalian izin usaha industri	99.994.578,00	82.159.519,00				- 17.835.059,00
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	49.994.578,00	48.671.519,00				- 1.323.059,00
							Program pengelolaan perikanan tangkap	4.181.998.406,00

Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Urusan	Program	Pagu APBD2025 (Rp.)	Pagu Perubahan RKPD 2025 (Rp.)	Selisih
				KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program pengelolaan perikanan budidaya	2.678.992.387,00	2.210.429.060,00	- 468.563.327,00
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		113.999.943,00	82.126.400,00	- 31.873.543,00	
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		799.998.687,00	210.103.000,00	- 589.895.687,00	
				PARIWISATA	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.232.944.046,00	11.987.403.391,00	10.754.459.345,00
			Program pemasaran pariwisata		1.749.795.044,00	1.989.874.000,00	240.078.956,00	
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		561.999.140,00	350.000.000,00	- 211.999.140,00	
				PERTANIAN	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	513.917.320,00	97.967.588,00	- 415.949.732,00
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		5.024.929.682,00	8.141.459.202,00	3.116.529.520,00	
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		1.074.545.603,00	3.346.302.250,00	2.271.756.647,00	
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		125.000.000,00	54.592.000,00	- 70.408.000,00	
			Program perizinan usaha pertanian		670.635.723,00	293.160.611,00	- 377.475.112,00	
			Program penyuluhan pertanian		752.543.220,00	297.502.205,00	- 455.041.015,00	
Penyediaan infrastruktur		Pembentukan Modal	20,63 - 20,84	PEKERJAAN UMUM DAN	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	37.121.412.000,00	84.409.921.944,00	47.288.509.944,00

Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Urusan	Program	Pagu APBD2025 (Rp.)	Pagu Perubahan RKPD 2025 (Rp.)	Selisih
yang mantap dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Tetap Bruto (% PDRB)	6,1 (SEB)	PENATAAN RUANG	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	5.388.660.000,00	45.661.661.711,00	40.273.001.711,00
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	15.337.691.000,00	22.944.236.663,00	7.606.545.663,00
					Program penataan bangunan gedung	25.698.746.500,00	49.213.795.459,00	23.515.048.959,00
					Program penyelenggaraan jalan	85.467.841.811,00	251.931.018.204,00	166.463.176.393,00
					Program pengembangan jasa konstruksi	297.036.000,00	598.838.200,00	301.802.200,00
					Program penyelenggaraan penataan ruang	1.692.718.000,00	1.259.821.600,00	- 432.896.400,00
		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Program pengembangan perumahan	969.960.060,00	1.048.938.015,00	78.977.955,00	
				Program kawasan permukiman	461.355.873,00	591.471.873,00	130.116.000,00	
				Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	5.619.999.405,00	10.224.681.629,00	4.604.682.224,00	
				Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	119.902.247.361,00	248.120.797.119,00	128.218.549.758,00	
		LINGKUNGAN HIDUP		Program perencanaan lingkungan hidup	449.999.137,00	322.685.180,00	- 127.313.957,00	
				Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.029.568.300,00	1.166.472.761,00	136.904.461,00	
				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	4.863.382.224,00	5.939.668.636,00	1.076.286.412,00	

Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Urusan	Program	Pagu APBD2025 (Rp.)	Pagu Perubahan RKPD 2025 (Rp.)	Selisih
					Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	79.999.154,00	0,00	- 79.999.154,00
					Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	235.719.322,00	257.274.118,00	21.554.796,00
					Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100.000.720,00	69.561.090,00	- 30.439.630,00
					Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	280.007.268,00	324.991.013,00	44.983.745,00

Tabel IV-8 Sinergi Kebijakan Provinsi Riau dengan Kabupaten Bengkalis

NO	Prioritas	Sub Prioritas	PROVINSI				KABUPATEN BENGKALIS						
			Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Pemenuhan Prasarana Dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (persen)	100	- Meningkatkan ketersediaan air minum - Membangun sarana prasarana sanitasi	- Fasilitasi percepatan pelayanan SPAM Regional - Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Rasio permukiman layak huni.	98,11	Fasilitasi penyediaan ; serta rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat	
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (persen)	100	- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	- Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik						
			Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (persen)	96,94	- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi	- Peningkatan akses dan infrastruktur energi						

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						lainnya ke seluruh wilayah							
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25 (tahun)	9,5	- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi	- Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10,85	Mengupayakan kesinambungan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak tempatan dan berprestasi	
						- Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	- Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri)					Meningkatkan Cakupan Peserta Pendidikan Paket	
						- Meningkatkan implementasi	- Penyelenggaraan pendidikan inklusif						

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						i Literasi masyarakat							
							- Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik						
							- Peningkatan Literasi masyarakat						
				Harapan lama sekolah (tahun)	13,54					Harapan Lama Sekolah		Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai minimal cakupan peserta didik.	Pengembangan Pendidikan Menengah Pertama dan Lanjutan/Kejuruan
										Angka Kelulusan	100 %	Fasilitasi cakupan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan	

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												kependidikan.	
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (poin)	77,11	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	- Menumbuhkan pengamalan kehidupan beragama						
						- Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama							
						- Meningkatkan ketentraman di masyarakat							

NO	Prioritas	PROVINSI						KABUPATEN BENGKALIS					
		Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,56	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Prima	Usia Harapan Hidup	72,03	Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat	Fungsionalisasi RS Pratama Rupal
												Mengoptimalkan keterjangkauan akses layanan kesehatan rujukan	Kesiapan RS Pratama Bukit Batu (Lahan, kajian dan Amdal).
									Meningkatnya kualitas Penanganan Stunting	Prevalensi Stunting	12	Pencegahan Stunting Secara Dini Melalui Peningkatan Pangan Sehat dan Gizi Masyarakat Khususnya	

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												di Masa Pra Nikah Dan Hamil serta Balita Dan Anak Usia Sekolah	
												Penguatan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan pusat kesehatan berbasis masyarakat	
		Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,37	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan - Meningkatkan kualitas	- Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak		Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	92	Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat	

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
							dari tindak kekerasan						
						keluarga serta perlindungan perempuan dan anak							
2	Peningkatan Tata Kelola	Tata Kelola Pemerintahan berbasis digital	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei penilaian integrasi (poin)	66,07	- Meningkatkan profesionalisme ASN	- Peningkatan Profesionalisme ASN	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A	Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan	
						- Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan	- Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan						

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan							
				Nilai survei indeks berakhlak (poin)	60,90	- Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	- Penataan manajemen ASN			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non Kependudukan	
				Nilai survei kepuasan masyarakat (poin)	86,15		- Peningkatan pelayanan publik inklusi						
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (poin)	3,06	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset - Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau - Peningkatan			Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)	2,3	Menyediakan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi	

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan daerah - Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah					yang terintegrasi	
				Capaian akuntabilitas kinerja (nilai)	73,03								
				Capaian akuntabilitas keuangan (predikat)	WTP	- Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan							
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan pergerakan	1,79	- Memantapkan jalan dan jembatan	- Meningkatkan keamanan kemandapan jalan	Penyediaan Infrastruktur dan Penataan kawasan yang	Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam	Panjang Jalan Poros dan jembatan pada wilayah	33,125 KM	Fasilitasi peningkatan kualitas jalan (jembatan) strategis	Rencana Pembangunan Jembatan P. Sumatera

PROVINSI						KABUPATEN BENGKALIS							
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				orang/barang melalui terminal/darmaga/bandara pertahun (persen)				berkelanjutan	kondisi baik	perbatasan dalam kondisi baik (KM)		pada kluster kawasan yang bersumber dari anggaran non APBD	- P. Bengkalis
						- Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	- Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi			Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	61,44 %	Mengembangkan jaringan jalan poros, jembatan dan penataan drainase pada wilayah kecamatan dan perdesaan	Rencana Pembangunan Jembatan Dumai Rupat
													Peningkatan konektivitas air putih (P. Bengkalis - P. Merbau)
									Meningkatnya kapasitas	Jumlah orang/barang yang	1.300 .000 orang /	Mengembangkan sistem	Optimalisasi ro-ro

PROVINSI								KABUPATEN BENGKALIS					
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
									angkutan penyebrangan	terangkut angkutan penyebrangan	43.200 barang	pelayanan jasa transportasi roro yang lebih memadai	dumai - rupa
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	72,41	- Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim		Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan		71,29	Menata kawasan permukiman perkotaan kecil dan permukiman kumuh	
						- Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keekaragaman hayati						Mengupayakan penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang	

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												terpadu, berkualitas dan berkelanjutan	
												Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air bersih bagi rumah tangga	
												Menyelenggarakan tata kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup	
												Kemitraan pengembangan potensi kawasan perbatasan yang selaras	

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
												dengan pelestarian lingkungan hidup	
			2. Menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (persen)	17,94	Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim	1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau						
4	Penguatan Ekonomi	Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	72,37	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri	Meningkatnya Kontribusi Non Migasterhadap Perekonomi daerah	Pertumbuhan Agregat Sektoral di Luar Migas	2,75 %	Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan sesuai peraturan	

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
								Kreatif Daerah				erundan g-undangan	
		Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	188,62	Memperbaiki iklim dan promosi investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan iklim dan promosi investasi 2. Peningkatan nilai tambah dan kualitas produk industri 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri 					Memberikan stimulus ekonomi, penyediaan sarana prasarana, pengembangan teknologi dan inovasi pendukung usaha pertanian dan perikanan	Keberlanjutan status KEK P. Bengkalis dan Rencana Pembangunan infrastruktur pendukung KEK

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
		Penguatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	160,97	- Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM		Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi	Pendapatan Perkapita Penduduk	203,21	Meningkatkan struktur sosial ekonomi masyarakat di perdesaan dan kelurahan	Pengembangan KIBB (Kawasan Industri Buruk Bakul)
				2. Gini Rasio (poin)	0,303	- Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah	2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya			Gini Ratio	0,276	Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat	Pembangunan PLBN P. Rupat
				3. Nilai tukar petani (poin)	167,52					Angka Kemiskinan	5,69%	Menjamin ketersediaan Pangan bagi masyarakat	

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,8289	- Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsi-an sosial masyarakat - Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencana melalui perlindungan dan jaminan sosial	- Peningkatan kompetensi aparatur desa - Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa						

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM	- Peningkatan kerjasama antar desa						
						- Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja						
						- Memperkuat pemerintahan desa	- Penambahan lapangan pekerjaan						
						- Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Peningkatan perlindungan dan pengawasaan tenaga kerja						
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05	- Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan							

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						penempatan tenaga kerja - Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja - Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda							
		Pariwisata Berbudaya Melayu	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (milyar rupiah)	26.947,14	- Meningkatkan aksesibilitas dan amenities pariwisata	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu		Terwujudnya nilai-nilai agamadan budaya melayu	PersetaseP emajuan Kebudayaan Melayu	100 %	Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi pendukung pengembangan promosi wisata pantai, kuliner warisan budaya lokal	Pemantapan KSPN Pulau Rupat terkoneksi dengan rencana konektivitas Dumai - P. Rupat - Malaka

PROVINSI							KABUPATEN BENGKALIS						
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
						- Meningkatkan promosi dan atraksi wisata						Mengembangkan dan mengimplementasikan model tata kelola potensi wisata terpadu	
			2. Meningkatkan ketahanan budaya melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau (persen)	54,54	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu					Melaksanakan pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap bangunan dan benda cagar budaya (BCB) bersitus kebudayaan melayu	
			3. Meningkatkan ekspresi dan warisan budaya melayu	1. Nilai ekspresi budaya (nilai)	47,69	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal							

PROVINSI						KABUPATEN BENGKALIS							
NO	Prioritas	Sub Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan
				2. Nilai warisan Budaya (nilai)	57,4								

Sementara itu, sinkronisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan supaya prioritas daerah yang telah ditetapkan bisa memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan memiliki arah yang benar dengan mengutamakan syarat-syarat pelayanan minimal pada masing-masing bidang pelayanandasar. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan standar pelayanan minimal. Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabelberikut.

Tabel IV-9 Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2025

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
1	Pendidikan	a. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	a. Program Pengelolaan Pendidikan
		b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional	b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		c. Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	c. Program Pengembangan Kurikulum
		d. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan)	
		e. Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
2	Kesehatan	a. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		b. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		c. Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		d. Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		e. Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
		f. Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		g. Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		h. Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		i. Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		j. Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
		k. Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
	Pekerjaan Umum	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	a. Program Penyelenggaraan Jalan
		b. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			c. Program Penataan Bangunan Gedung
			d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			g. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
			i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Perumahan Rakyat	c. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		d. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	b. Program Pengembangan Perumahan
			c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			e. Program Kawasan Permukiman
			f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
			g. Program Peningkatan
			h. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5	Trantibumlinmas	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		b. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		c. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terdapat bencana	g. Program Penanggulangan Bencana
		d. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	h. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		e. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
		penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
6	Sosial	a. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	i. Program Pemberdayaan Sosial
		b. Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	j. Program Penanganan Bencana
		c. Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	k. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		d. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	l. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		e. Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	m. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			n. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			o. Program Rehabilitasi Sosial
			p. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan rekapitulasi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif seluruh Perangkat Daerah dalam Kabupaten Bengkalis untuk pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Rencana Program dan Kegiatan tersebut dipaparkan pada Tabel 5.1 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 untuk penggalan tahun 2025. Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya pada Tahun 2025 mendatang. Perangkat Daerah yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, RSUD, kantor dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Perubahan RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2025 terutama di setiap SKPD;
- 3) Pada akhir TA. 2025, setiap SKPD di Kabupaten Bengkalis wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
- 4) Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh OPD harus terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan OPD sesuai tupoksi dan perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD. Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis pada

dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 selain menyesuaikan pada pencapaian sasaran dan target RPJMD juga menyesuaikan dengan struktur perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda KBUPten Bengkalis, tahap pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi. Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan mengacu pada Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Daerah Kabupaten Bengkalis.

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI